

Judul : Moratorium Kunker : Efektif atau Sekedar "Lips Service"?
Tanggal : Kamis, 20 September 2012
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 20

Moratorium Kunker

Efektif atau Sekedar "Lips Service"?

HUKUM & POLITIK

Studi banding atau kunjungan kerja (kunker) DPR ke luar negeri kembali mendapat kritikan dari masyarakat. Berbagai alasan diciptakan hanya untuk melanggengkan kunker. Kunker dianggap penting untuk menambah masukan dan informasi materi suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang dibahas. Hal itulah yang sering kali telontar dari mulut anggota DPR. Sedangkan alasan lainnya, kunker sudah direncanakan dan dianggarkan.

Selama ini jarang manfaat yang didapat dari studi banding, yang ada malah masyarakat tahunya anggota DPR jalan-jalan sesampai di tempat tujuan. DPR perlu introspeksi. Apakah moratorium kunker efektif ataukah sekedar *lips service*? Wartawan SP Carlos KY Paath mengulasnya dalam tulisan di bawah ini.

Ada sejumlah kejanggalan atas berbagai alasan DPR melakukan kunker. Bahkan, demi mempelajari logo palang merah yang bakal diatur dalam RUU Palang Merah Indonesia (PMI), DPR melakukan kunker ke Denmark dan Turki. DPR juga pernah ke Afrika Selatan, hanya untuk belajar Pramuka.

Mendapat kritikan pedas dari masyarakat, wacana moratorium atau penghentian sementara kunker digulirkan. Namun, wacana itu terkesan hanya *lips service* belaka serta memboroskan energi DPR untuk mengerjakan tugas pokok fungsi (tupoksi)

"Moratorium kunker hanya pemanis belaka. Mungkin untuk meredakan kritik masyarakat. Wacana itu juga cerita lama. Bukankah (moratorium) sudah didiskusikan sejak 2010. Nyatanya, moratorium bergema, kunker jalan terus," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, kepada SP, di Jakarta, Rabu (19/9).

Dia mengungkapkan, persyaratan ketat kabarnya sudah dibuat oleh DPR waktu itu. Namun pada kenyataannya, hanya dengan alasan mau studi logo palang merah, DPR sudah

dapat menikmati kanal Copenhagen, Denmark. "Dulu, kode etik Badan Kehormatan juga di studi bandingkan ke dua negara, antara lain ke Turki. Seka-

rang hasil kode etik yang di studi bandingkan, malah disebut tidak memadai untuk mencegah anggota DPR berperilaku buruk," ungkapnya.

Dia menuturkan, DPR selalu ingin menjawab kritikan dengan masyarakat melalui revisi peraturan. Peraturan dibuat makin ketat, tapi untuk dilanggar sendiri. "Di atas peraturan-peraturan yang hendak DPR buat itu, perubahan sikap anggota DPR jauh lebih utama. Berpikir picik dengan selera rendahan ala DPR, memanfaatkan uang negara untuk bersenang-senang adalah pikiran picik dan selera rendahan dari anggota DPR yang harus diubah," tuturnya.

Ditambahkan, kepada anggota DPR harus ditanamkan rasa harga diri yang kuat. Sebab, suatu hal memalukan jika menggunakan fasilitas negara hanya untuk kepentingan pribadi, merusak nurani bila mendengar rakyat menderita. Membuang semangat mencari kenikmatan dari fasilitas negara adalah jauh lebih penting. Dengan demikian, DPR dapat tetap dipandang dan layak ditempatkan sebagai anggota masyarakat yang terhormat," katanya.

Berdasarkan data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), anggaran ke luar negeri anggota DPR pada

2012 mencapai Rp 140 miliar. Anggaran itu naik Rp 2,6 miliar dibanding 2013, yakni sebesar Rp 137 miliar. "Alokasi anggaran kunker DPR sesuai data DIPA 2012 sebelum APBN Perubahan 2012, sebesar Rp 140.122.157.000. Bila dibandingkan dengan tahun 2011, maka mengalami kenaikan sebesar Rp 2.671.847.000 atau sebesar Rp 137.450.310.000 untuk alokasi anggaran "study tour tahun 2011," kata Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi.

Menurutnya, alokasi terbesar dari anggaran itu adalah untuk Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), yaitu sebesar Rp 29,8 miliar. Sedangkan, alokasi kedua anggaran terbesar untuk Pimpinan DPR, yaitu Rp 26,8 miliar.

"BKSAP mendapat anggaran yang paling banyak disusul pimpinan DPR. Sedangkan, Komisi I DPR menempati ranking tiga dengan alokasi anggaran Rp 9 miliar dan Badan Legislasi menempati urutan empat dengan alokasi anggaran sebesar Rp 7,7 miliar," katanya.

yang menjadi landasan kunker. "Studi banding itu sudah ada ukuran dari pimpinan, tatib dikeluarkan tahun lalu. DPR diperkenankan kunker ke luar negeri dalam berbagai kegiatan," kata Marzuki.

Menurut Marzuki, kunker yang berkaitan RUU, tidak bisa dilarang karena menyangkut kebijakan publik. Membuat UU harus banyak referensinya.

Penghematan

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut mengaku, pihaknya telah melakukan penghematan terhadap anggaran DPR khususnya terkait dana kunker. DIPA DPR tahun ini tidak melebihi APBN. "Kalau mau berhemat, kita sudah sangat berhemat, DIPA DPR itu tidak sampai nol koma nol persen dari APBN. Banyak tempat lain yang harusnya dihemat," tandasnya.

Sementara Wakil Ketua DPR, Pramono Anung menyatakan, pimpinan DPR berjanji akan segera membahas moratorium kunker. Pembahasan itu akan diagendakan dalam rapat pimpinan DPR. Dia menilai moratorium itu memang perlu segera diberlakukan. "Saya yakin memang sudah harus dibatasi (kunker)," ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini.

Sedangkan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso juga mengatakan, pimpinan DPR akan meminta pandangan Badan Kehormatan (BK) dan

Ketua DPR Marzuki Alie mengungkapkan, sejak periode 2011, tata tertib DPR yang mengatur kunker telah ditetapkan. Artinya, sudah ada acuan

“
Studi banding itu sudah ada ukuran dari pimpinan, tatib dikeluarkan tahun lalu. DPR diperkenankan kunker ke luar negeri dalam berbagai kegiatan



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

fraksi-fraksi DPR terkait moratorium kunker. "Dalam rapat konsultasi, pimpinan DPR akan minta kewenangan untuk memperketat kunker," kata Priyo.

Ketua DPP Partai Golkar tersebut menambahkan, Pimpinan DPR akan minta pandangan BK terlebih dahulu. Selanjutnya, baru akan rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi. "Kami akan panggil rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi akan bicarakan hal ini apakah nanti akan ada moratorium," imbuhnya.

Dukung Moratorium

Sejumlah fraksi di DPR mendukung wacana moratorium kunker. Ketua Fraksi PD di DPR Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, fraksinya mendukung moratorium. Namun harus ada pengecualian untuk beberapa komisi. Misalnya Komisi I DPR yang berkaitan dengan masalah luar negeri. "Kami dukung moratorium. Mungkin untuk hal yang berkaitan Komisi I yang mitranya luar negeri diperbolehkan," kata Nurhayati.

Dijelaskan, anggota FPD yang tidak aktif dalam pembahasan RUU tidak akan diberikan izin oleh FPD. "Pimpinan fraksi kami hanya membolehkan anggota fraksi yang kinerjanya bagus," jelasnya.

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar (FPG) telah menerbitkan aturan internal yang melarang anggotanya melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. "Peraturan internal tersebut mulai diberlakukan pada masa persidangan mendatang. Kecuali bila kunjungan tersebut dipastikan benar-benar untuk kepentingan negara dan rakyat," kata Sekretaris FPG di DPR, Ade Komarudin.

Dia berpendapat, secara prinsip kunker itu harus selektif dan tepat sasaran. Sehingga tidak terkesan untuk menghabiskan anggaran. Karena itulah, FPG telah membuat aturan internal yang mengatur anggotanya tidak diperbolehkan ke luar negeri tanpa alasan yang jelas. "Perlu ada mekanisme dan aturan khusus

yang mengatur kunker secara selektif melalui mekanisme dan persyaratan yang selektif dan akuntabel. Sehingga, kunker benar-benar bermanfaat bagi lembaga maupun masyarakat seperti studi banding pembuatan RUU atau bagaimana untuk meningkatkan kinerja lembaga DPR," ujarnya.

Fraksi PDI-P juga mendorong agar moratorium kunker segera dilaksanakan. FPDI-P sudah memilah-milah untuk mengikuti kunker. "Di internal PDI-P sudah sejak lama mem-

batasi kunjungan kerja ke luar negeri bagi anggotanya. Yakni, hanya pada persoalan yang substantif dan urgen bagi DPR," kata Ketua FPDI-P di DPR Puan Maharani.

Dia menambahkan, kunker yang diizinkan pun hanya sebatas pembahasan mengenai BKSAP, hibah, dan RUU.

"Kita membatasi hanya pada BKSAP, hibah, dan pembahasan RUU. Di luar itu, tidak mengizinkan untuk pergi," imbuhnya.

Berkaitan dengan larangan kunker, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) patut menjadi contoh. Sebab, Fraksi Gerindra melarang anggota fraksinya untuk mengikuti kunker.

Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto memberi sanksi keras kepada anggota DPR Fraksi Gerindra yang nekat ke luar negeri. "Kita sudah lama atau hampir setahun (tidak ikut kunker). Kita harus hemat anggaran," kata Prabowo.

Menurutnya, setiap uang rakyat harus digunakan seefisien dan seefektif mungkin. Namun, Gerindra memberikan pengecualian. Dijelaskan, seumpama dalam pelaksanaan tugas anggota DPR maka diizinkan. "Sebagai contoh anggota DPR itu ditempatkan di Komisi IX DPR yang fokus mencermati masalah tenaga kerja, maka dia harus mengurusnya. Atau dalam rangka kerjasama antarpemerintahan. Ada undangan, dibayar pihak sana, kita tidak ada masalah. Yang penting kita harus ringankan beban kepada rakyat," tegas mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus ini. ◆